



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : WAHYU HENDRATMOKO  
NIK : 3471140211740001  
Lembaga : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
Unit Kerja : DINAS PARIWISATA  
Sub Unit Kerja : DINAS PARIWISATA  
Jabatan : KEPALA DINAS  
Jenis Laporan : Periodik - 2023  
Tanggal Kirim : 28 Februari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**UNIT KERJA** : DINAS PARIWISATA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : WAHYU HENDRATMOKO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 210037

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.925.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/80 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 135.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/120 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 80.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 462 m2/269 m2 di KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 505 m2 di KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 1.700.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/200 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
6. Tanah Seluas 1258 m2 di GUNUNG KIDUL, WARISAN Rp. 60.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 859.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOTOR, HONDA GOLDWING SEPEDA MOTOR Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU AYL A DAIHATSU AYL A Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
5. MOBIL, SUZUKI FUTURA PICK UP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000



6. MOTOR, HONDA ASTREA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
7. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.5 G MT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
8. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.4 2WD/VT Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
9. MOTOR, HONDA NC11BF1CB A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
10. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
11. MOBIL, TOYOTA TOYOTA Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
12. MOBIL, SUZUKI KARIMUN Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
13. MOTOR, TVS KING BAJAJ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>565.129.662</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.357.629.662</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>611.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.746.629.662</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.